

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos | Jawa Pos | Media Indonesia | Wawasan |
| Tribun Jateng | Metro Jateng | Republika | Kompas | Media Online |

Wilayah Berita: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Halaman 5 dan 10

BPKP Blejeti Aplikasi Siskeudes

PATI- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah, mengevaluasi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kabupaten Pati. Evaluasi tersebut menghadirkan seluruh Kades/Lurah se Kabupaten Pati, di ruang paripurna DPRD Pati, Selasa (10/7) kemarin.

Setelah tiga tahun penerapan aplikasi Siskeudes di sejumlah Kabupaten/Kota, maka BPKP Perwakilan mengevaluasi langsung ke daerah-daerah. Salah satunya ke Kabupaten Pati yang sudah 100 % desa/kelurahannya menerapkan aplikasi itu.

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Samono mengatakan, evaluasi implementasi aplikasi Siskeudes dalam upaya mengawal kebijakan Pemerintah terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, salah satunya mem-

berikan bantuan pengembangan aplikasi untuk akuntabilitas dan transparansinya.

"Hari ini seperti yang kita lihat sama-sama evaluasi implementasinya. Menurut catatan kami, sudah sekitar 90 persen di wilayah desa di Jawa Tengah sudah menggunakan aplikasi Siskeudes ini," katanya.

Sedangkan khusus untuk Kabupaten Pati, kata Samono, sudah dilaksanakan sebesar 100 %. Bahkan Kabupaten Pati juga sudah bisa mengkompilasi sebagai lampiran LKPD yang diperiksa Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK).

"Itu telah berhasil dibuat melalui aplikasi Siskeudes yang kita kembangkan bersama Kementerian Dalam Negeri," paparnya.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Samono mengaku BPKP tidak akan melakukan pemeriksaan seperti yang menjadi kewenangan BPK maupun Inspektorat.

"Pihak BPKP baru melakukan pemeriksaan terhadap suatu penyelewengan, biasanya hanya diminta untuk melakukan penghitungan kerugian negara saja," terangnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Hery Subowo, juga mengapresiasi penerapan Siskeudes di Kabupaten Pati yang sudah mencapai 100%. Bahkan dalam implementasinya, setiap desa sudah bisa menyusun ikhtisar laporan keuangan desa.

"Mereka menggunakan Siskeudes. Dari laporan keuangan

itu, dilampirkan dalam laporan keuangan Pemkab Pati yang diperiksa setiap tahunnya. Jadi memang kita (BPK, red) sangat mendorong penerapannya, karena akan meningkatkan akuntabilitas baik di tingkat desa maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota," paparnya.

Hery menjelaskan, belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mampu menerapkan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan, dalam hal ini Siskeudes.

"Sehingga BPKP Perwakilan Jawa Tengah masih mengawasi penyelenggaraannya, terutama tingkat kepatuhan desa dalam penerapan aplikasi itu," tambahnya.

Selain di Kabupaten Pati, sambung Hery, evaluasi penerapan aplikasi Siskeudes juga dilakukan di Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Banjarnegara. (gus/rif)

EVALUASI SISKUEDES BPKP

- ◆ Kabupaten Pati
- ◆ Kabupaten Semarang
- ◆ Kabupaten Kendal
- ◆ Kabupaten Banjarnegara